TAJUK RENCANA

Apresiasi Trik Cerdik KPK Tangkap Gubernur Papua

Tidak terjadi gejolak berarti dalam penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe. KPK bersama tim Brimob Papua mulus menangkap Lukas saat yang bersangkutan sedang makan di salah satu restoran di Abepura, Jayapura, Selasa (10/1), sebelum terbang menuju Tolikara.

Sikap gerak cepat KPK menangkap Lukas Enembe pantas diapresiasi, mengapa? Karena sebelumnya KPK terkesan melemah. Lukas menolak diperiksa dan warga Papua menjaga ketat kediaman Gubernur Papua itu sehingga aparat keamanan harus bersabar alias gagal menangkap paksa Enembe setelah dipanggil beberapa kali.

Kedatangan Ketua KPK dan tim penyidik KPK ke rumah kediaman Gubernur Papua bulan lalu menimbulkan kritikan, seakan KPK pilih kasih, lemah saat Lukas Enembe bersikeras tidak mau diperiksa di Jakarta. Pada akhirnya KPK hanya memeriksa Lukas beberapa jam saja dengan sejumlah pertanyaan, lalu pulang ke Jakarta dengan barang bukti minim.

Intisari:

"Sekali lagi salut buat KPK yang pura-pura lemah dalam penyidikan kasus Lukas Enembe. Ternyata KPK masih tetap menunjukkan konsistensinya dalam memberantas korupsi"

Hemat kita, penangkapan Lukas berujung kencuhan kecil adalah hal biasa. Namun begitu, tidak tertutup kemungkinan para pendukung Lukas akan menggalang kekuatan untuk melakukan provokasi, dan inilah yang perlu diwaspadai aparat keamanan di pusat dan daerah kepala burung itu.

Kalau Mabes Polri mengingatkan masyarakat Papua agar tidak terhasut dengan isu kemerdekaan setelah Gubernur Lukas Enembe ditangkap, maka kita mendesak pemerintah tidak hanya mengingatkan atau mengimbau semata. Perlu ada upaya nyata berupa aksi-aksi preventif dengan mengedukasi elemen masyarakat, tokoh-tokoh Papua untuk tidak ikut-ikutan menentang penegakan hukum yang dimunculkan kelopok penentang.

Penangkapan Gubernur Lukas Enembe bisa saja dimanfaatkan kelompok separatis dan teroris, seperti KKB (kelompok kriminal bersenjata) atau kelompok lain yang bertujuan sama ingin melepaskan Papua dari NKRI. Jangan sampai penangkapan Lukas oleh KPK dijadikan kelompok separatis atau teroris sebagai momentum bagi pentolan KKB untuk menghasut dan memprovokasi masyarakat dan tokoh-tokoh Papua.

Jelaskan bahwa penangkapan paksa Enembe sudah sesuai prosedur hukum bahwa semua orang sama kedudukan di mata hukum, apalagi kasus yang membelit Lukas adalah kejatan luar biasa berupa korupsi uang negara yang juga uang rakyat.

Justru itu kita memuji trik dan strategi yang dipakai KPK dengan mengacu jurus "mundur selangkah untuk menang". Jika bulan lalu dipaksakan menangkap KPK di kediamannya yang dikawal ketat warga Papua dengan senjata tradisionalnya pasti muncul insiden besar yang tak diinginkan. Bakal banyak korban jiwa. Jadi, KPK memilih bersabar menunggu momentum pas, saat warga lengah "mengawal" Lukas karena dinilai sudah aman baru aparat keamanan dan KPK bergerak dan berhasil.

Sukses KPK menggelandang Gubernur Papua menghilang image negatif, setelah sebelumnya pubiik dikejutkan dengan statement salah seorang pimpinan KPK yang mengatakan tidak berani menangkap Lukas Enembe karena takut ada konflik horizontal dan alasan klasik sebagainya. Faktanya, KPK tetap ngarang, tidak pilih kasih, walau butuh waktu karena tersangka kasus korupsi dan gratifikasi Gubernur Papua yang dikenal dekat dengan warga dan tokoh masyarakat.

Sekali lagi salut buat KPK yang pura-pura lemah dalam penyidikan kasus Lukas Enembe. Ternyata KPK masih tetap menunjukkan konsistensinya dalam memberantas korupsi. Hanya saja kita ingatkan, kasus yang menjerat Gubernur Papua cukup banyak, termasuk isu pencucian uang, main judi menggunakan pesawat carteran dll.+

Surat Pembaca

HUT Ke 76 Harian Waspada

Agenda Setting Kawal Akidah Umat

Oleh Dr H. Erwan Efendi, S.Sos, MA.

Empat halaman untuk Mimbar Jumat adalah merupakan lahan terbuka yang disediakan oleh Waspada kepada para tokoh intelektual Muslim dalam menyampaikan gagasan, ide, pendapat atau saran sebagai upaya membangun dan mengajak umat untuk melaksanakan amar makruf nahi munkar

Sejarah mencatat kelahiran Harian Waspada Medan 11 Januari 1947, keadaan negara Indonesia yang baru diproklamasikan Ir Soekarno pada 17 Agustus 1945 tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi penuh gejolak politik baik internal maupun eksternal. Secara internal pemerintah harus menghadapi konflik politik dalam negeri. Secara eksternal sedang berupaya mempertahankan kemerdekaan terhadap adanya keinginan kembali Belanda masuk menjajah Indonesia yang dibonceng sekutu.

Strategi awal ketika masuk kembali menjajah Indonesia, Belanda melakukan politik devide et impera atau yang dikenal sebagai politik adu domba dan politik pemecah belah. Belanda melakukan strategi politik ini sebagai upaya menguasai dengan lebih dahulu melumpuhkan suatu kelompok yang menjadi target, baik dengan pengaruh besar maupun kecil agar terpecah-belah. Jika strategi ini berhasil, maka dengan mudah Belanda dapat menguasai Indonesia kembali.

Dampak negatif dari politik adu domba dan pecah belah yang dimainkan Belanda tersebut semakin terasa menguat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Agitasi dan provokasi yang dilakukan Belanda mulai mengusik kerukunan dan keharmonisan baik di dalam keluarga maupun di luar atau di tengah masyarakat. Pandangan masyarakat mulai terpecah menanggapi proklamasi.

Melihat keadaan itu, para kandidat penggagas lahirnya Harian Waspada; Allahyarham H. Mohd. Said dan Almarhummah Bunda Hj.Ani Idrus dan kawan-kawan mulai risau dan resah. Mereka khawatir jika saja politik kotor Belanda itu dibiarkan mulus berguliir, maka proklamasi akan kandas. Sementara sebagai kader Partai Nasional Indonesia, mereka mempunyai tanggung jawab moral untuk harus terlibat secara aktif membantu menyampaikan pesan-pesan kemerdekaan itu kepada masyakarakat agar tujuan proklamasi terwujud sesuai harapan dan keinginan.

Sebagai kader PNI, Allahyarham H. Mohd. Said dan Almarhummah Bunda Hj. Ani Idrus dan kawan-kawan ingin secapatnya menyampaikan pesan-pesan kemerdekaan kepada masyarakat khusunya di Medan, dalam upaya mengonter politik provokasi Belanda. Namun, tidak tahu seperti apa cara yang efektif. Jika dilakukan secara door to door, itu tidak mungkin karena cukup banyak rumah yang harus dikunjungi sementara tenaga komunikator sangat terbatas. Sedangkan melalui siaran radio, itu hanya dimiliki oleh Belanda.

Keadaan semakin genting. Para kandidat penggagas mulai tidak sabar dan harus secepatnya membangun media sebagai alat penyampai informasi kemerdekaan kepada khalayak. Para penggagas menilai politik jahat Belanda tersebut jika tidak segera diwaspadai, maka kegagalkan proklamasi akan menjadi kenyataan. Akhirnya, mereka bersepakat mendirikan media cetak dengan nama Waspada pada 11 Januari 1947.

Melalui media cetak Waspada ini, para pendiri terus menyampaikan pesan-pesan kemerdekaan dan meng-counter isu-isu provokasi dan agitasi yang dijual Belanda. Beberapa dampak kebijakan Waspada dalam menyampaikan pesan-pesan kemerdekaan itu, termasuk mengambil berita luar negeri yang menjelekan Belanda untuk dimuat di Waspada menyebabkan Belanda naik pitam. Balasannya, Belanda pernah melarang Waspada terbit dan bahkan pernah melakukan hukuman kurungan rumah terhadap keluarga dan pendiri harian Waspada. Dalam kondisi dan situasi negara seperti itulah, Waspada lahir, sehingga ia disebut sebagai koran perjuangan.

Banyak yang bertanya, sebagai media nasional tertua di luar Pulau Jawa mengapa Waspada memilih dan mengusung motto yang sangat sederhana yakni Demi Kebenaran dan Keadilan. Padahal banyak motto lain yang bagus dan bisa diangkat. Secara pasti kita tidak mengetahui apa tujuan dan keinginan pendiri Waspada memilih Demi Kebenaran dan Keadilan sebagai motto. Tetapi, jika kita mencermati konten-konten yang diangkat oleh Waspada, paling dominan adala mengenai kehidupan masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat kecil.

Dalam kaitan ini Waspada selalu mengangkat berita dari yang banyak untuk yang sedikit. Artinya, yang banyak itu adalah masyarakat sedang yang sedikit adalah penguasa. Pemerintah diharapkan mendengar berbagai persoalan rakyat kecil yang diinformasikan dan kemudian membantu mengatasinya.

Ketidakbenaran dan ketidakadilan selalu menyelimuti atau mewarnai kehidupan masyarakat kecil. Bukan hanya itu, masyarakat kecil sangat sulit untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran. Sementara penegakan hukum cenderung tajam kebawah dan tumpul ke atas. Di negara kaya raya ini yang selalu tumbuh dan berkembang adalah lembaga pengadilan sedangkan keadilan semakin jauh dari harapan dan itu terjadi hingga hari ini.

Tidak hanya mengusung motto Demi Kebenaran dan Keadilan, tapi Waspada juga telah menyatakan diri sebagai media Nasional Religius. Itu artinya dalam kegiatan sehari-hari dan sebagai media pejuang Waspada selalu mengutamakan sifat kebangsaan dan agama. Bersikap nasional artinya Waspada terus membangun wawasan kebangsaan dari Sabang hingga Maraoke. Kemudian mengedepankan religius sebagai pengamalan dari sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Kata kuncinya adalah bahwa sesungguhnya agama dan negara tidak boleh dipisahkan dengan alasan dan kepentingan apapun.

Indonesia adalah merupakan negara ketuhahanan. Artinya, setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia harus mengakui adanya Tuhan. Karena itu, siapa saja yang tidak mengakui adanya Tuhan maka orang bersangkutan tidak boleh tinggal dan menjadi warga negara di Indonesia. Justru, jika ada orang yang ingin menghapus kata Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Itu sama artinya ingin menghapus Tuhan atau agama di negara ini.

Dalam konteks pengamalan ajaran agama yang setiap warga negara dijamin oleh negera, Waspada sebagai media nasionalis religius selalu memberi kontribusi agar kehidupan beragama di negara ini selalu pada posisi rukun dan harmonis serta terbaik. Terbaik bukan hanya hubungan antarumat beragama, tapi juga antar dan internal umat beragama serta umat beragama dengan pemerintah. Inilah yang disebut dengan tri kerukunan.

Bagi umat Islam khusus di Sumut dan Aceh, saat ini Waspada adalah merupakan satu-satunya media yang tetap setia dalam mengawal akidah umat. Karena itu, Waspada telah membangun strategi agenda setting dalam mengawal akidah umat tersebut. Strategi pertama Waspada telah menginfakan paling tidak dua halaman pada setiap hari Jumat yang disebut dengan Mimbar Jumat. Di halaman Mimbar Jumat ini berisi tulisan bernuansa agama dari para pakar agama.

Empat halaman untuk Mimbar Jumat adalah merupakan lahan terbuka yang disediakan oleh Waspada kepada para tokoh intelektual Muslim dalam menyampaikan gagasan, ide, pendapat atau saran sebagai upaya membangun dan mengajak umat untuk melaksanakan amar makruf nahi munkar. Jika halaman itu dijadikan uang, bila satu halaman seharga Rp25 juta, maka dalam sebulan Waspada sudah berinfak Rp400 juta dan setahun berarti Waspada berinfak Rp4,8 miliar. Jumlah infak Waspada sebesar itu murni untuk kepentingan mengawal akidah umat melalui dakwah bil qalam atau tulisan.

Strategi agenda setting lain yang dilakukan Waspada adalah menempatkan wartawannya di sumber-sumber berita agama seperti di perguruan tinggi Islam baik negeri maupun swasta, lembaga dan Ormas Islam seperti di Kementerian Agama RI, Majelis Ulama Indonesia, dan lain-lain. Kemudian mengutamakan pemuatan berita-berita agama apalagi pada kegiatan agama seperti Musyabaqah Tilawatil Quran, peringatan hari besar Islam, pelaksanaan ibadah haji, menjadikan para tokoh atau para intelektual islam sebagai nara sumber.

Penutup

Harus kita pahami bahwa hingga saat ini satu-satunya media cetak di Sumut dan Aceh bahkan mungkin di luar Pulau Jawa yang masih konsisten mengawal akidah umat dalam bentuk dakwah bil qalam adalah Harian Waspada. Karena itu, secara empiris Waspada bukan lagi milik pendiri tetapi adalah merupakan aset umat. Persoalannya, secara umum baik nasional maupun internasional kondisi media khususnya media cetak tidak dalam keadaan baik termasuk Waspada karena berbagai faktor.

Justru, dapat kita prediksi ke depan seandainya Waspada hanya tinggal sejarah, media mana yang muncul sebagai pengganti. Sejauh ini kita belum melihat ada kandidat pengganti Waspada sebagai media pengawal akidah umat. Berdasarkan pertimbangan itu, para lembaga dan ulama serta intelektual Muslim diharapkan berempati mempunyai tanggung jawab moral bagaimana ikut bersama mempertahankan keberadaan harian Waspada agar tetap eksis dan mengawal akidah umat zaman berzaman.

Melihat keadaan itu, lembaga, institusi Islam, para ulama, mubaligh, ustadz sangat efektif jika memberi pemahaman kepada umat dan jamaahnya tentang bagai mana pentingnya mengunkan eksistensi Waspada sebagai pengawal akidah umat sehingga layak menjadi bacaan setiap Muslim. Jika membeli paket data atau pulsa untuk HP, uang pembeliannya tidak diketahui secara jelas kemana pemafaatannya. Tetapi jika membeli koran Harian Waspada sudah jelas alokasi sebagian keuntungan digunakan untuk kepentingan sosial. Semoga.

Penulis adalah Wartawan Harian Waspada, Dosen Pascasarjana UIN Sumut.

Dipindai dengan CamScanner